



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.26/M.PPN/HK/04/2021**

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS TANPA MELALUI LELENG
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-137/MK.6/WKN.07/KNL.01/2020 tanggal 8 Desember 2020 dan S-138/MK.6/WKN.07/KNL.01/2020 tanggal 8 Desember 2020 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tanpa Melalui Lelang, telah disetujui untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara penjualan tanpa lelang;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang Nomor SP-001/SES/12/2020 tanggal 18 Desember 2020, Nomor SP-002/SES/12/2020 tanggal 18 Desember 2020, Nomor SP-003/SES/12/2020 tanggal 18 Desember 2020, Nomor SP-004/SES/12/2020 tanggal 18 Desember 2020, Nomor SP-005/SES/12/2020 tanggal 18 Desember 2020, telah dilakukan perjanjian penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara atas Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang Nomor BA-001/BAST-BMN-PTL/01/2021 tanggal 29 Januari 2021, telah dilakukan serah terima Barang Milik Negara kepada Wismana Adi Suryabrata, Jabatan Inspektur Utama, Nomor BA-002/BAST-BMN-PTL/02/2021 tanggal 2 Februari 2021, telah dilakukan

serah ...

serah terima Barang Milik Negara kepada Slamet Soedarsono, Jabatan Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Nomor BA-003/BAST-BMN-PTL/02/2021 tanggal 2 Februari 2021, telah dilakukan serah terima Barang Milik Negara kepada Himawan Hariyoga Djojokusumo, Jabatan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Nomor BA-004/BAST-BMN-PTL/02/2021 tanggal 8 Februari 2021, telah dilakukan serah terima Barang Milik Negara kepada Leonard VH Tampubolon, Jabatan Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan, dan Nomor BA-005/BAST-BMN-PTL/02/2021 tanggal 10 Februari 2021, telah dilakukan serah terima Barang Milik Negara kepada Arifin Rudiyanto Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pengawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional, Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS TANPA MELALUI LELANG PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Menghapuskan 5 (lima) unit Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Total nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA yaitu sebesar Rp2.330.000.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan total nilai penjualan sebesar Rp426.000.000 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah).

KETIGA : ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ditemukan adanya kekeliruan maka dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2021

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.26/M.PPN/HK/04/2021
TANGGAL 8 APRIL 2021

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS TANPA MELALUI LELANG
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Tanggal Perolehan	Merk/ Type	Jumlah	Nomor Polisi	Nomor BPKB	Nomor Mesin	Nomor Rangka	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Jual (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3020101001	Sedan	3	23/09/2013	Toyota Camry 2.5G A/T	1	B 1696 PQA	K06142932	2ARU055704	MRO53AK50D4503320	466.000.000	85.200.000
2	3020101001	Sedan	4	23/09/2013	Toyota Camry 2.5G A/T	1	B 1697 PQA	K06142934	2ARU054877	MRO53AK50D4503275	466.000.000	85.200.000
3	3020101001	Sedan	8	23/09/2013	Toyota Camry 2.5G A/T	1	B 1701 PQA	K06142937	2ARU055310	MRO53AK50D4503302	466.000.000	85.200.000
4	3020101001	Sedan	11	23/09/2013	Toyota Camry 2.5G A/T	1	B 1704 PQA	K06142999	2ARU055680	MRO53AK50D4503316	466.000.000	85.200.000
5	3020101001	Sedan	12	23/09/2013	Toyota Camry 2.5G A/T	1	B 1705 PQA	K06143000	2ARU049225	MRO53AK50D4503185	466.000.000	85.200.000
TOTAL						5					2.330.000.000	426.000.000

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.
 Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati